

Sementara negara memiliki peranan yang semakin tidak berfungsi, *government failures*. Bayangkan saja nilai ekonomi akibat dari polusi semakin besar, maka efek yang ditimbulkan akan membuat net economic welfare yang semakin menurun. Pantas berbagai buku baru yang juga concern pada pertumbuhan, menyatakan the limit of growth. Lahirnya pemikiran innovation dilemma dan the economic value of carbon, memberikan warna tersendiri dalam literature ekonomi.

Kegagalan dari pasar bisa terjadi mengingat lamahnya peranan pemerintah dalam mengoreksi dan meminimumkan efek negatif dari lingkungan. Ketika terlalu kecil ide baru dalam menemukan masalah dalam pembangunan, maka yang terjadi adalah persoalan yang konsisten dan terus menerus. Tentunya dengan lahirnya postulasi dari pemikiran mereka membuat negara mesti memberikan peranan yang lebih besar, dalam mengurangi masalah yang berkaitan dengan lingkungan dan pertumbuhan.

Unsur inovasi juga semakin memainkan peranan. Sayang negara juga perlu menyediakan sejumlah anggaran untuk melahirkan inovasi. Jika inovasi dapat meningkatkan peranannya, maka pertumbuhan potensial ekonomi ke depan dapat lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak orang.

27. Koran Padang Ekspres

Jum'at, 26 Oktober 2018

FAKULTAS KOPI

Minggu terakhir presiden Joko Widodo, mengulang pernyataan beliau di depan para dirjen Kemenristekdikti dan Rektor. Agar perguruan tinggi berubah. Berubah dengan merespon permintaan real lapangan kerja. Fakultas-fakultas yang sudah tua, perlu di-close, dan diganti dengan fakultas kopi, kelapa sawit, dan sejenisnya. Jika tidak PT akan digiling oleh mereka yang cepat pertumbuhannya.

Pernyataan itu beliau sampaikan atas dasar kekecewaan. Bahwa hanya 3 dari 4000 lebih PT di Indonesia, yang mampu masuk 500 terbaik di dunia. Bahkan ketika beliau mengunjungi Institut Pertanian Bogor, beliau juga menyatakan bahwa diperlukan pembuatan fakultas penggilingan padi.

Bagi saya apapun yang disampaikan oleh Presiden adalah sah-sah saja. Walaupun kita perlu meluruskan pandangan beliau. Bahwa bukan fakultas penggilingan padi, fakultas kopi, atau fakultas kelapa sawit yang diperlukan, namun pendidikan akademi komunitas, atau politeknik setara dengan Diploma 3 yang mesti diarahkan ke jenis-jenis proses pendidikan di jenjang pendidikan tinggi.

Apalagi kegusaran beliau terlihat bagaimana lambannya birokrasi untuk mengakomodasi pengembangan dan penyesuaian pendidikan tinggi. Berbagai proposal diajukan ke Kemenristekdikti, namun kemudian mentok. Karena persyaratan yang ditetapkan untuk pembukaan prodi baru sangatlah ketat. Tetapi pada masa bersamaan pendirian pendidikan tinggi, mulai dari PT di bawah organisasi keagamaan, atau yayasan yang bernaung pada bisnis-bisnis BUMN atau swasta nampaknya mudah untuk diterbitkan izinnnya.

Mandat

Kelambanan dari cara kerja PT dan Kemenristekdikti bisa jadi disebabkan karena juga kontribusi undang-undang yang membatasi kewenangan pemerintah daerah dalam terlibat mengelola dan membiayai pendidikan tinggi. Kewenangan yang selama ini